

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan akhir dari penelitian tentang kesiapan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja pada tahun 2011. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura belum siap dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh kendala utama yang berasal dari aspek regulasi yaitu belum selesainya restrukturisasi program pada tingkat eselon 1 (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan). Restrukturisasi program pada tingkat eselon 1 harusnya sudah selesai pada akhir tahun 2009 (sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Penerapan PBK dan KPJM), tetapi mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini berdampak pada terlambatnya Penyusunan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Tahunan yang membutuhkan dokumen sumber Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014.

Selain kendala utama (aspek regulasi) diatas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura menghadapi beberapa kendala dalam beberapa aspek. Antara lain aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek keuangan.

## V.2. Saran

Restrukturisasi program merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai eselon 1, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura sebagai eselon 3 (UPT) hanya bersikap pasif. Kendala utama yang dihadapi ini tentunya bukan merupakan kewenangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura untuk menyelesaikannya.

Terkait dengan persiapan dan penyesuaian yang harus dipenuhi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura hendaknya melakukan berbagai pembenahan. Pembenahan meliputi berbagai aspek antara lain :

1. Mengajukan usulan perbaikan standar biaya khusus kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Standar biaya hendaknya disesuaikan dengan harga riil.
2. Bersikap pro aktif dalam memperoleh informasi mengenai penganggaran berbasis kinerja, yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak terkait (Departemen Keuangan dan Bappenas) atau melakukan studi banding ke instansi yang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (6 Kementrian/Lembaga yang ditunjuk sebagai *pilot project*)
3. Melakukan sosialisasi kepada karyawan/pegawai terkait dengan perubahan regulasi.
4. Menempatkan pegawai yang menguasai perencanaan dan anggaran pada Seksi Pemolaan Kawasan Hutan (PKH) demi menunjang kinerja Seksi PKH terutama dalam hal perencanaan dan anggaran serta dapat

memberikan *update* informasi terkait dengan perubahan regulasi keuangan. Dan menambah tenaga pengukur untuk proses kerja di lapangan.

5. Meningkatkan kedisiplinan waktu atas *deadline* kerja. Hal ini dapat diintegrasikan dengan *reward & punishment* yang diberlakukan bagi pegawai mengingat *reward & punishment* belum diberlakukan atas ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan.
6. Segera melakukan pembenahan terkait dengan sarana dan prasarana, antara lain *upgrade* peralatan komputer dan *maintenance website*.
7. Jika terdapat dana atau anggaran, hendaknya dapat mewujudkan *database* yang terintegrasi dan penataan arsip yang baik dan benar yang dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. "Perencanaan dan Penganggaran APBN". <http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/C336ABF8-7005-40F3-87D0-8520FD969BF2/1758/KuanganPerencanaandanPenganggaranAPBN.pdf>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2009.
- Anonim, (2009). *Buku 2 Pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Departemen Keuangan & Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- \_\_\_\_\_, (2009). *Buku 5 Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup*. Jakarta: Departemen Keuangan & Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Asri, M. & Adisaputro, G.(1996). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Azwar, A. (1996) *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Bimaputra Aksara.
- BPKH XI Jawa-Madura, (2008). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2009
- \_\_\_\_\_. (2009). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2010
- Christina, E., Fuad, M., Sugiarto. & Sukarno, E. (2001). *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nazier, Daeng, M. (2009). *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. <http://www.bpk.go.id/web/files/2009/07/daeng-paper-semnas-22-juli-2009-final.pdf>. Diakses pada Tanggal 30 Juli 2009
- Dickey, T. (2001). *Dasar-dasar Penganggaran*. Jakarta: PPM.
- Hasibuan. M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2002). *Management Information Systems-Managing The Digital Firm 7<sup>th</sup>Ed*. New Jersey, United States: Prentice Hall.

- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mathiassen, Lars, Munk-Madsen, Andreas, Nielsen, Peter A & Stage, Jan. (2000). *Object Oriented Analysis & Design*. Edisi ke-1. Denmark: Marko Publishing Aps.
- McLeod, Raymond, Jr. (2001). *Sistem Informasi Manajemen Jilid I*, Edisi ketujuh, Jakarta : Alih Bahasa : Hendra Teguh, SE, AK. PT Prehalindo.
- McCloy, R.A., Campbell, J.P., Cudeck, R. (1994). "Confirmatory test of Model Performance Determinant". *Journal of Applied Psychology*, Vol 79.
- Munandar, M. (2000). *Budgeting Perencana Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawas Kerja*. Yogyakarta: BPFPE.
- O'Brien, J.A. (2003). *Introduction to Information Systems, 11<sup>th</sup> Ed.* New York, United States: McGraw-Hill.
- Purwanto, E.A. & Kumorotomo, W. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: MAP-UGM bekerja sama dengan ADEKSI.
- Republik Indonesia, (2003). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- \_\_\_\_\_, (2004). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- \_\_\_\_\_, (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- \_\_\_\_\_, (2006). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/MENHUT-II/2006 Tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Kehutanan
- \_\_\_\_\_, (2007). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/KPTS-II/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- Rienke, W.A. (1994). *Perencanaan Kesehatan untuk meningkatkan Efektivitas Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Salomo, Roy, Valiant. (2005). *Anggaran yang Berorientasikan Pada Prinsip dan Kepemimpinan yang Baik*. . Jakarta: Fisip-UI.
- Sancoko, B., Tjik, D., Madjid, N., Sumini., Triatmoko, H.(2008). *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Shim, K.J., Siegel, G.J. (2000). *Budgeting Pedoman Lengkap Langkah-langkah Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Soegiharto. (2001). "Influence Factors Affecting The Performance Of Accounting Information System". *Gajah Mada International Journal of Business*. Volume III No. 2
- Sulistiyani, S., Fahada, M.F., Isfiati, S., Sumekar, Y., Pairs, A. (2008). *Profil BPKH Wilayah XI Jawa-Madura*. Yogyakarta: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.
- Suprasto, B. (2006). "Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja". *Buletin Studi Ekonomi* Vol.3:270-281.
- Syamsi, I. (1988). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Akasara.
- Ward, Jhon dan Peppard, Joe. (2002). *Strategic Planning for Information System*, Third Edition. England: John Willey & Sons LTD.



# LAMPIRAN

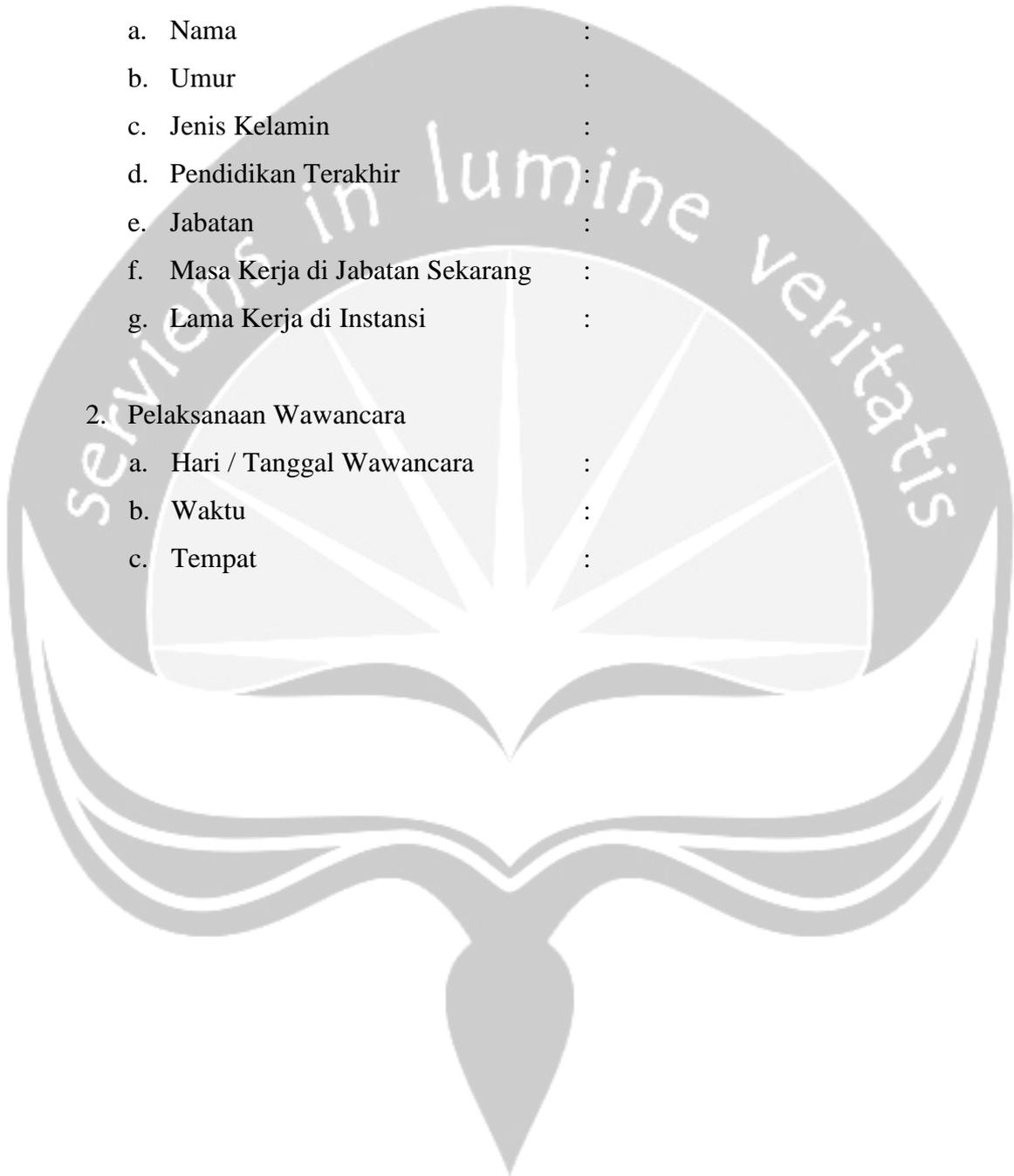
## DATA RESPONDEN

### 1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Jabatan :
- f. Masa Kerja di Jabatan Sekarang :
- g. Lama Kerja di Instansi :

### 2. Pelaksanaan Wawancara

- a. Hari / Tanggal Wawancara :
- b. Waktu :
- c. Tempat :



## PEDOMAN WAWANCARA

### Responden : Kelompok Kerja Penyusun Anggaran, Program dan Evaluasi

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang anggaran berbasis kinerja?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui langkah-langkah penyusunan anggaran pada BPKH XI Jawa-Madura? Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja?
3. Apakah dasar pedoman yang digunakan dalam menyusun anggaran ? Sebutkan!
4. Sebelum menyusun anggaran berbasis kinerja, apakah ada penejelasan dari Kepala BPKH XI Jawa-Madura tentang kebijakan dan prioritas program? Jelaskan!
5. Menurut bapak/ibu bagaimana peran Kepala BPKH XI Jawa-Madura dalam menyusun anggaran berbasis kinerja?
6. Apakah bapak/ibu telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan anggaran berbasis kinerja? Kapan?
7. Menurut bapak/ibu bagaimana kemampuan/kualitas SDM perencana anggaran di kelompok kerja bapak/ibu?
8. Apakah sarana dan prasara pada BPKH XI Jawa-Madura telah mendukung dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja?
9. Apakah seluruh aktivitas sudah terintegrasi dengan komputer ? apakah masih ada 9aktivitas yang dilakukan secara manual?
10. Apakah keuntungan yang bapak/ibu peroleh dalam menyusun anggaran dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja?
11. Apakah kendala-kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja (aspek regulasi, SDM, sarana & prasarana dan keuangan)?
12. Apakah usul dan saran bapak/ibu dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Responden : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura

1. Apa yang bapak lakukan dalam mempersiapkan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja?
2. Siapa saja yang terlibat di dalam rancangan anggaran tersebut?
3. Menurut bapak, apakah penyusunan anggaran telah sesuai dengan RENSTRA, RENJA Tahunan, TUPOKSI Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura?
4. Apakah setiap sub bagian yang menyusun anggaran berdasarkan standar analisis belanja, sebagaimana konsep anggaran berbasis kinerja?
5. Apakah tim perencana/kelompok kerja penyusun anggaran, program dan evaluasi telah mendapatkan pelatihan tentang anggaran berbasis kinerja?
6. Menurut bapak, dari segi kualitas sumber daya manusia perencana anggaran telah memadai?
7. Apakah sarana dan prasara pada BPKH XI Jawa-Madura telah mendukung dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja?
8. Apakah BPKH XI Jawa-Madura memiliki sistem informasi *database* yang terintegrasi untuk memudahkan penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran?
9. Apakah BPKH menyediakan dana untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan Sistem Penganggaran Berbasis kinerja? Berapa alokasi dana yang dianggarkan? Apakah alokasi dana yang dianggarkan cukup untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan PBK?
10. Apakah keuntungan yang bapak/ibu peroleh dalam menyusun anggaran berbasis kinerja?
11. Apakah kendala-kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja (aspek regulasi, SDM, sarana & prasarana dan keuangan)?
12. Apakah usul dan saran bapak/ibu dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Responden : Kepala Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan

1. Siapakah yang terlibat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di BPKH
2. Bagaimana proses penyusunan anggaran di BPKH?
3. Bagaimana kemampuan dari perencana dalam menyusun anggaran berdasarkan Tupoksi?
4. Apakah tim perencana telah mendapatkan pelatihan tentang anggaran berbasis kinerja?
5. Bagaimana peran SDM perencana pada masing-masing unit kerja?
6. Hambatan apa sajakah yang menjadi kendala dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja?
7. Bagaimana peran Kepala BPKH Wilayah XI Jawa-Madura dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja?
8. Apakah sarana dan prasarana pada BPKH XI Jawa-Madura telah mendukung dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja?
9. Apakah seluruh aktivitas sudah terintegrasi dengan komputer ? apakah masih ada aktivitas yang dilakukan secara manual?
10. Apakah BPKH XI Jawa-Madura memiliki sistem informasi *database* yang terintegrasi untuk memudahkan penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran?
11. Apakah BPKH menyediakan dana untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan Sistem Penganggaran Berbasis kinerja? Berapa alokasi dana yang dianggarkan? Apakah alokasi dana yang dianggarkan cukup untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan PBK?
12. Apakah keuntungan yang bapak/ibu peroleh dalam menyusun anggaran berbasis kinerja?
13. Apakah kendala-kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja (aspek regulasi, SDM, sarana & prasarana dan keuangan)?
14. Apakah usul dan saran bapak/ibu dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja?

### KUESIONER

Nama : .....  
Umur : .....tahun  
Jenis Kelamin : .....

---

Lingkarilah pilihan jawaban anda dan berikan jawaban dengan singkat dan jelas

1. Apa latar belakang pendidikan anda ? jurusan?
  - a. SMA/SMK  
jurusan.....
  - b. S1 jurusan  
.....
  - c. S2 jurusan  
.....
  - d. Lainnya.....  
.....
  
2. Lama anda bekerja di BPKH XI Wilayah XI Jawa-Madura  
.....
  
3. Jabatan anda di BPKH XI Jawa-Madura.....  
Lama anda bekerja pada jabatan sekarang.....
  
4. Apakah pernah mengikuti diklat/pelatihan?
  - a. Tidak
  - b. Ya (sebutkan, boleh lebih dari satu)  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai anggaran berbasis kinerja?

a. Jika Ya,

- Berapa kali mengikuti sosialisasi Anggaran berbasis kinerja?

.....  
.....

- Siapa saja yang memberikan sosialisasi?

.....  
.....  
.....

- Apakah atas inisiatif sendiri atau ditugaskan oleh instansi?

.....  
.....

- Berapa beban anggaran yang digunakan untuk sosialisasi?

.....  
.....

b. Tidak

6. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan/diklat mengenai anggaran berbasis kinerja?

a. Jika Ya,

- Berapa kali mengikuti pelatihan/diklat Anggaran berbasis kinerja?

.....  
.....

- Siapa saja yang memberikan pelatihan/diklat ?

.....  
.....  
.....

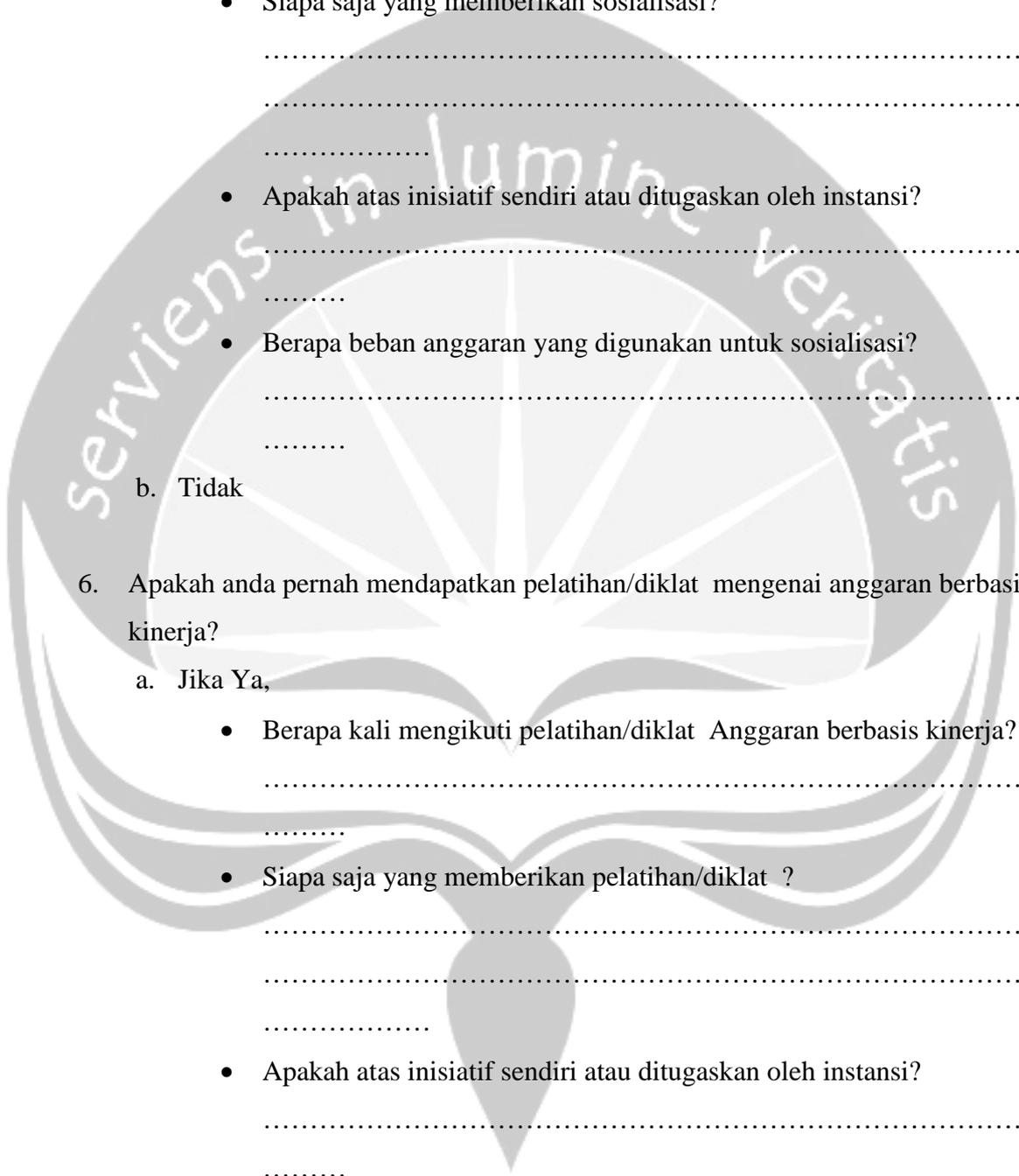
- Apakah atas inisiatif sendiri atau ditugaskan oleh instansi?

.....  
.....

- Berapa beban anggaran yang digunakan untuk pelatihan/diklat ?

.....  
.....

b. Tidak



7. Apakah anda memahami sistem anggaran berbasis kinerja ?

a. Jika Ya

Anggaran Berbasis Kinerja menurut

anda.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

b. Tidak

8. Apakah ada keinginan untuk mempelajari berbagai perubahan aturan terkait dengan sistem anggaran berbasis kinerja?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah anda mengetahui bentuk pertanggungjawaban keuangan negara? Jelaskan secara singkat!

.....  
.....  
.....  
.....

10. Apakah anda mengetahui jadwal penyusunan anggaran di BPKH Wilayah XI Jawa-Madura ?

a. Ya

b. Tidak

11. Apakah anda mengetahui aturan yang digunakan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja?

a. Ya (sebutkan)

.....  
.....  
.....

b. Tidak

12. Apakah terdapat komputer sebagai penunjang kinerja anda?

- a. Ya
- b. Tidak

13. Apakah anda dapat mengoperasikan komputer dalam mendukung kinerja anda?

- a. Ya
- b. Tidak

14. Apakah jumlah dan spesifikasi komputer di BPKH XI Wilayah Jawa-Madura mencukupi kebutuhan anda dan kelompok kerja dalam melakukan pekerjaan?

- a. Ya
- b. Tidak

15. Apakah komputer terintegrasi dengan intranet maupun internet?

- a. Ya
- b. Tidak

16. Program dan aplikasi apa saja yang bisa dikuasai? (boleh lebih dari satu)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. Apakah masih ada aktivitas yang dilakukan secara manual?

- a. Ya, Sebutkan

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Tidak

18. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menyusun anggaran dengan menggunakan sistem penganggaran terbaru (Penganggaran Berbasis Kinerja) ?

.....

.....

.....

.....

.....

### Matrik : Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2005-2009

No	Misi	Sasaran Strategis BPKH XI	Program	Kegiatan Pokok	Kegiatan BPKH Wilayah XI	Volume Kegiatan				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	Mewujudkan rencana kehutanan yang menjadi acuan pembangunan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Renstra BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2005-2009</li> <li>• Terwujudnya Rencana Kerja BPKH Wilayah XI Jawa-Madura</li> <li>• Tersedianya analisis data dan informasi untuk penyusunan rencana kehutanan daerah dan pusat</li> </ul>	Pemantapan pemanfaatan potensi SDH	Penyusunan rencana-rencana kehutanan	• Review Renstra BPKH XI Tahun 2005-2009	-	1 buku	-	-	-
					• Penyusunan Renja BPKH Wilayah XI	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku
					• Review Penyusunan MPRHL Jatim dan Jateng	2 prov	-	-	-	-
					• Penyusunan data informasi dan analisis untuk penyusunan Rencana Kehutanan Provinsi Jangka Menengah dan Jangka Panjang	-	6 prov	6 prov	6 prov	6 prov
					• Identifikasi Rencana dan kebijakan Kehutanan Daerah	10 kab	10 kab	10 kab	10 kab	10 kab
					• Penyusunan daftar usulan kegiatan dan anggaran	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku
					• Sosialisasi Renstra	-	-	6 prov	-	-
					• Sosialisasi Peraturan & perundang-undangan	-	-	-	6 prov	6 prov
						-	-	20 kab	20 kab	20 kab
						-	-	1 lap	1 lap	1 lap
	-	-	6 prov	-	-					
	-	-	3 kab	-	6 kab					
				Penyelenggaraan KLN	-	-	-	-	-	

				Penyiapan implementasi konversi-konversi internasional	-	-	-	-	-
				Penyiapan rumusan kebijakan kehutanan di tatanan global dan regional	-	-	-	-	-
2	Mengembangkan sistem informasi (spasial dan non spasial kehutanan)	• tersedianya data dan informasi sumber daya hutan terkini dan perubahannya secara periodik	Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Pelaksanaan inventarisasi hutan nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• enumerasi TSP/PSP</li> <li>• Re-enumerasi PSP</li> <li>• Identifikasi Mangrove</li> <li>• Inventarisasi Hutan produksi</li> <li>• Inventarisasi SDH TN Gn Merapi dan Gn Merbabu</li> <li>• Identifikasi kerusakan kawasan hutan</li> <li>• Risalah hutan lindung</li> <li>• Inventarisasi hutan rakyat</li> <li>• Pemantauan kondisi kawasan konservasi</li> <li>• Pemantauan pengelolaan HL</li> <li>• Inventarisasi Sosial Budaya</li> </ul>	10 klaster - 3 lokasi - - - - - - - - - - - -	20 klaster - - 1 prov - 4 kab - 6 prov - - - 6 lokasi 5 lokasi 4 lokasi	20 klaster - - - - - 6 prov - - 6 lokasi - 2 lokasi	20 klaster - - - - - 6 prov 2 lokasi 5 kab 6 lokasi - 4 lokasi	20 klaster 10 klaster - - - - 6 prov 2 lokasi 5 kab 6 lokasi - 4 lokasi
				Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi di tingkat prop/kab/kota, unit pengelola	Asistensi pelaksanaan inventarisasi hutan daerah	-	-	-	6 prov 6 prov
				Fasilitasi penyusunan NSDH Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan NSDH provinsi</li> <li>• Asistensi penyusunan NSDH Provinsi</li> </ul>	2 prov -	2 prov -	1 prov -	1 prov 5 prov 1 prov 5 prov
				Penyusunan NSDH Nasional	Menyediakan data dan informasi untuk penyusunan NSDH Nasional	-	-	-	6 prov 6 prov
				Penyiapan database kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelusuran dokumen Tata Batas</li> <li>• Pemasangan jaringan titik kontrol</li> <li>• Pembuatan database pengukuhan kawasan hutan</li> <li>• Pembuatan <i>website</i> BPKH Wil. XI</li> </ul>	3 lokasi - -	5 lokasi 20 titik 1 paket	5 lokasi - -	5 lokasi 20 titik 1 paket 5 lokasi 20 titik 1 paket

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan buletin</li> <li>• Pengadaan peta digital RBI skala 1:25.000</li> <li>• Penyusunan database tukar menukar &amp; pinjam pakai kawasan hutan</li> </ul>	- - -	1 paket 1 paket 300 lbr	- 1 paket 150 lbr	1 paket 1 paket 150 lbr	1 paket 1 paket 150 lbr
				Penyusunan statistik kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan statistik BPKH Wil XI</li> <li>• Penyusunan Statistik Kehutanan provinsi</li> <li>• Penyusunan statistik kehutanan regional</li> </ul>	1 buku - -	1 buku 1 buku -	1 buku 1 buku -	1 buku 1 buku 1 buku	1 buku 1 buku 1 buku
				Pengembangan sistem informasi assesment pembangunan kehutanan (SIAPHUT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan dan pengembangan jaringan SIAPHUT</li> <li>• Pengumpulan data SIAPHUT</li> </ul>	1 paket 5 kab	1 paket 10 kab	1 paket 15 kab	1 paket 20 kab	1 paket 2 kab
				Penyediaan data/informasi spasial dan non spasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan data produksi dan konsumsi kayu bukat</li> <li>• Sosialisasi kawasan hutan</li> <li>• Pemeliharaan dan pengembangan SIG</li> <li>• Pembuatan peta tematik</li> <li>• Sosialisasi data dan informasi hasil kegiatan BPKH Wil XI</li> </ul>	6 prov - 1 paket 25 lbr -	6 prov 5 kab 1 paket 250 lbr -	6 prov 3 kab 1 paket 100 lbr -	6 prov 6 kab 1 paket 100 lbr 10 kab	6 prov 6 kab 1 paket 100 lbr 10 kab
3	Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang proporsional pada DAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data dan informasi lahan sebagai penunjukan kawasan hutan secara makro dan parsial</li> <li>• Tercapainya usulan penetapan kawasan hutan konservasi sebanyak 40 unit</li> <li>• Tersedianya data informasi serta terpantaunya proses penetapan kawasan hutan produksi dan lindung</li> </ul>	Pemantapan pemanfaatan potensi SDH	Penerbitan SK Menhut tentang penunjukkan kawasan hutan (dan perairan) propinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kawasan yang akan ditunjuk (parsial)</li> </ul>	- -	- -	- -	6 prov	6 prov
				Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi batas kawasan konservasi</li> <li>• Koordinasi pembentukan PTB</li> <li>• Rekonstruksi Batas Kawasan Konservasi</li> <li>• Pengukuran dan penataan Batas Kawasan Konservasi</li> </ul>	600 km - 200 km 125 km	300 km - 600 km 190 km	330 km 10 kab 300 km 280 km	300 km 5 kab 330 km 400 km	300 km 5 kab 300 km 400 km
				Pelaksanaan penetapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusulan penetapan kawasan hutan</li> <li>• Pemeriksaan hasil tata batas hutan lindung dan hutan produksi yang akan ditetapkan</li> </ul>	1 lokasi	3 lokasi	-	4 lokasi	6 lokasi

				Regulasi penetapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi publik regulasi kawasan hutan</li> </ul>	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi penataan ruang perubahan status, fungsi dan penggunaan kawasan hutan</li> </ul>	-	-	-	6 prov	6 prov
				Pelaksanaan evaluasi perubahan peruntukan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pinjam pakai /tukar menukar kawasan hutan</li> <li>Identifikasi dan penilaian perubahan status, fungsi dan penggunaan kawasan hutan</li> </ul>	5 lokasi	4 lokasi	7 lokasi	10 lokasi	10 lokasi
				Pelaksanaan penafsiran citra satelit termasuk pemeriksaan di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penafsiran citra satelit dan <i>ground check</i> di lapangan</li> </ul>	-	-	15 scene	-	15 scene
4	Mewujudkan unit pengelolaan hutan lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data dan informasi dalam mendukung pengelolaan hutan lestari pada hutan produksi &amp; lindung di setiap provinsi</li> </ul>	Pemantapan pemanfaatan potensi SDH	Penyusunan KPHP, penyusunan rencana investasi KPHP, pembentukan lembaga KPHP, koordinasi pembentukan KPHP dengan pemda, regulasi & insentif KPHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan data informasi dan analisis untuk penyusunan rencana pengelolaan tingkat KPH</li> <li>Asistensi penyusunan rencana pengelolaan KPH</li> </ul>	-	-	-	1 KPH	1 KPH
				Koordinasi pembentukan KPHL dengan Pemda, regulasi		-	-	-	1 KPH	1 KPH

				dan insentif KPHL, penyusunan KPHL, reformasi regulasi serta kebijakan dan insentif pemanfaatan NTFP dalam KPHL						
5	Meningkatkan kelembagaan BAPLAN Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhiya kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung kegiatan BPKH XI</li> <li>• Terbangunnya jejaring kerja dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam mendukung pembangunan wilayah</li> <li>• Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemantapan kawasan hutan</li> </ul>	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	Penyusunan rencana pengembangan kepegawaian, Penyelenggaraan kepegawaian, reformasi sistem insentif SD kehutanan, identifikasi kebijakan, reglasi yang tumpang tindih, penyusunan TAHUBJA tentang kewenangan pengurusan hutan antar pusat dan daerah, pelimpahan wewenang secara bertahap sesuai TAHUBJA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebutuhan pegawai</li> <li>• Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian</li> <li>• Pembahasan TAHUBJA</li> <li>• Membangun jaringan kerja dengan <i>stakeholder</i> (instansi pemerintah, swasta, media massa, masyarakat)</li> </ul>	1 rencana 56 orang  1 paket -	56 orang  - -	58 orang  - -	58 orang  1 kali 1 paket	58 orang  1 kali 1 paket



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA - MADURA**  
Alamat : Jl. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Telp. (0274) 388923 Fax. (0274) 388922 Yogyakarta,

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KT. 06 /BPKH-XI.1/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIP : Ir. GIRI DARMINTO / 710017821  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
BPKH Wil. XI Jawa-Madura

menerangkan bahwa :

Nama : HERONIMUS HERU ADITYO  
Nomor Mahasiswa/jurusan : 16061/ EA

berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 80/R/I tanggal 14 Oktober 2009 tentang ijin penelitian untuk penulisan skripsi, yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan beberapa Pejabat Struktural dan pengambilan data dengan mengedarkan kuesioner isian kepada Koordinator kelompok kerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan melanjutkan penulisan skripsi/ karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan.

Demikian Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 April 2010  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Ir. GIRI DARMINTO  
NIP. 710017821